

PRESS RELEASE

Jakarta, 15 Juni 2010

PELANTIKAN PROF DR MARDIASMO Ak MBA PhD SEBAGAI KEPALA BPKP OLEH MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pada hari Selasa ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan melantik Prof DR Mardiasmo Ak MBA, PhD sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang baru. Pelantikan dilakukan di Auditorium Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta. Mardiasmo mengisi jabatan menggantikan pejabat Kepala BPKP sebelumnya, Drs. Didi Widayadi, MBA yang memasuki masa pensiun pada bulan Juli tahun 2009 lalu. Mardiasmo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut EE Mangindaan mengungkapkan harapan Pemerintah agar BPKP dapat menjalankan fungsi sebagai *quality assurance* atas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Dalam pengelolaan Keuangan Negara, selain sebagai *quality assurance*, BPKP juga dapat berperan sebagai *consultant* agar pengelolaan Keuangan Negara dapat dijalankan secara efisien, efektif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan paradigma baru bagi peran sebuah unit kerja pengawasan intern di era moderen seperti saat ini.

Sementara itu Kepala BPKP, Mardiasmo menyampaikan bahwa untuk menjawab tugas yang diberikan oleh Pimpinan Nasional, BPKP siap untuk meningkatkan kapabilitas dan unjuk kinerja. BPKP akan melakukannya dengan tiga strategi pengawasan, yaitu Pre Emptive, Preventif dan Represif. Pre Emptive merupakan strategi pengkondisian keadaan dimana pada instansi pemerintah dan masyarakat terbangun *public awareness* agar peduli terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan memahami cara-cara mengatasinya. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi.

Strategi Preventif merupakan upaya membangun *early warning system* yang dapat mencegah dan mendeteksi (*prevention and detection*) perbuatan penyimpangan pengelolaan keuangan negara sesegera mungkin. Hal ini dilakukan antara lain melalui kegiatan konsultasi, bimbingan teknis dan penyusunan sistem atau pedoman kerja.

Yang ketiga, strategi Represif merupakan upaya yang dilakukan BPKP dalam pemberantasan korupsi atau penindakan atas penyimpangan pengelolaan keuangan negara melalui audit investigatif. Upaya ini dikembangkan lebih lanjut menjadi strategi Represif untuk Preventif, yaitu dimana setiap proses penindakan hukum diikuti dengan evaluasi mendalam agar di masa mendatang, penyimpangan tersebut dapat dicegah.

Mardiasmo juga mengungkapkan bahwa kinerja BPKP selama ini layak diapresiasi dan harus dilanjutkan dengan kinerja yang lebih baik. Hal ini untuk menjawab tantangan

dunia pengawasan intern di masa mendatang agar lebih berperan dalam mencapai Tujuan Nasional. Beberapa capaian kinerja BPKP yang layak diapresiasi antara lain :

- Total temuan BPKP selaku Ketua Tim Optimalisasi Keuangan Negara sejak berdiri hingga tahun 2010 sebesar Rp 33,4 triliun, US\$ 872,07 juta dan S\$0,63 juta.
- Peran BPKP dalam peningkatan opini hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan bahwa dari 90 LKPD yang mengalami peningkatan dari opini Tidak Wajar (TW) /Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang diasistensi BPKP sebanyak 70 LKPD (77,78 %) . Selain itu dari 11 LKPD yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seluruhnya telah diasistensi oleh BPKP.
- Saat ini BPKP dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. BPKP telah menyerahkan Laporan Hasil Audit investigasi kepada instansi sejak tahun 2005 hingga April 2010 penyidik sebanyak 915 kasus dengan nilai kerugian keuangan negara Rp 2,559 triliun dan US\$18,702 juta.
- BPKP telah membantu perhitungan kerugian negara sejak tahun 2005 hingga April 2010 senilai Rp 9,185 triliun, US\$ 195,82 juta, RM 21,93 juta, KIP 5,47 jta, GBP 0,002 juta dan yuan 10,28 juta.
- Pelaksanaan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan, eskalasi dan klaim sejak tahun 2005 hingga april 2010 sebanyak 535 laporan dengan nilai penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 629,08 miliar, US\$ 19,09 juta dan Euro 5,6 juta
- BPKP melakukan audit atas kinerja PDAM sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini telah mendorong upaya restrukturisasi dan penyehatan PDAM dalam rangka penyediaan air bersih sesuai target MDGs.
- Assessment atas implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN memberikan kontribusi bagi upaya Pemerintah menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai infrastruktur dan landasan operasional kegiatan usaha BUMN.
- Dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, BPKP telah melakukan beberapa kegiatan antara lain bimbingan teknis, konsultasi, inventarisasi Barang Milik Negara, Evaluasi Kebijakan dan kajian pengawasan. Evaluasi Kebijakan yang telah dilakukan antara lain evaluasi kebijakan atas program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Program BOS Buku. Sedangkan kajian pengawasan antara lain kajian pengawasan barang dan jasa Pemilu tahun 2009.

Informasi lebih lanjut : Humas BPKP 021 8584985